



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 35 /POJK.04/2017

TENTANG

KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

**SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PIHAK PENERBIT
DAFTAR EFEK SYARIAH**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar
Efek Syariah

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
(Nama Jalan & Nomor)
.....
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon, Faksimile,
dan Email :
4. Nomor dan Tanggal
pengesahan Anggaran Dasar
atau Dokumen sejenis yang
telah memperoleh
persetujuan dari instansi
yang berwenang :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi bukti pembayaran atas permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
2. fotokopi anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang (bagi pemohon yang belum mendapatkan izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan);
3. struktur organisasi perusahaan;
4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;

5. daftar nama dan data anggota direksi, yang meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku;
 - c) fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing bagi direksi berkewarganegaraan asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.
6. surat pernyataan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan Daftar Efek Syariah;
7. fotokopi surat izin ASPM anggota DPS yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah yang diterbitkan;
8. surat penunjukan direksi kepada DPS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah yang diterbitkan dan kesediaan DPS atas penunjukan tersebut;
9. surat pernyataan kesediaan DPS atas penunjukan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah Daftar Efek Syariah yang diterbitkan;
10. surat pernyataan DPS mengenai pernyataan kesyariahan Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan
11. fotokopi dokumen standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah dengan menggunakan kertas berlogo perusahaan serta mencantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh anggota direksi.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

(Pemohon)
(ttd)

meterai

.....

(nama jelas)
Direktur

Tembusan:

Direktur Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS
PENYUSUNAN DAFTAR EFEK SYARIAH**

PERNYATAAN DIREKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan :
4. Kegiatan usaha :
5. Alamat :
(nama jalan dan nomor)
.....
(kota dan kode pos)
6. Telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab penuh terhadap penyusunan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

(tempat),(tanggal, bulan, tahun)
(ttd)

meterai

.....
(nama jelas)

**SURAT PERNYATAAN DPS TENTANG KESEDIAAN SEBAGAI PIHAK
YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMENUHAN KEPATUHAN
SYARIAH DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITERBITKAN**

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor dan Tanggal :
SK ASPM
3. Nama Perusahaan :
4. Kegiatan usaha :
5. Alamat :
: (nama jalan dan nomor)
.....
(kota dan kode pos)
6. Telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan yang disebutkan di atas, akan bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kepatuhan syariah pada Daftar Efek Syariah yang diterbitkan perusahaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

(tempat),(tanggal, bulan, tahun)
(ttd)

meterai

.....
(nama jelas)

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH
DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor dan Tanggal :
SK ASPM
3. Nama Perusahaan :
4. Kegiatan usaha :
5. Alamat :
: (nama jalan dan nomor)
.....
(kota dan kode pos)
6. Telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan yang disebutkan di atas, menyatakan bahwa Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh (nama Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah) pada tanggal telah sesuai dengan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

(tempat),(tanggal, bulan, tahun)
(ttd)

meterai

.....
(nama jelas)

LAPORAN PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

..... ,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Pihak
Penerbit Daftar Efek Syariah

Kepada
Yth. Direktur Pasar Modal Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor..... tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana terlampir:

1. Daftar Efek Syariah yang diterbitkan beserta perubahannya selama tahun berjalan dengan batas akhir periode laporan per 31 Desember; dan
2. Surat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(Nama Perusahaan)
(ttd)

.....
(nama jelas)
Direktur

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

Yuliana

MULIAMAN D. HADAD